

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
TRIBUNAN IV TAHUN 2023**



DINAS TENAGA KERJA

JL. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546 Lumajang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum	5
D. Dasar Hukum	8
E. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023	16
B. Akuntabilitas Keuangan	35
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	50
BAB IV PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 38 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 26 orang dan Tenaga Kerja Bulanan sebanyak 12 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Bulan Desember tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Kerja Bulanan Dinas Tenaga Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per bulan Desember Tahun 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	%	Tenaga Kerja Bulanan	%		
1	Strata 2 (S 2)	6	23.07	0	0	6	15.79
2	Strata 1 (S 1)	10	38.46	7	58.34	17	44.74
3	Diploma 3	1	3.85	0	0	1	2.63
4	SLTA/SMK	8	30.77	4	33.33	12	31.58
5	SLTP	0	0	1	8.33	1	2.63
6	SD	1	3.85	0	0	1	2.63
J U M L A H		26	100.00	12	100.00	38	100.00

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan Per bulan Desember tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja
Berdasarkan Tingkat Golongan
Per bulan Desember Tahun 2023

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Golongan IV	7	0	7
2	Golongan III	14	0	14
3	Golongan II	4	0	4
4	Golongan I	1	0	1
Jumlah		26	0	26

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terbanyak pada jenjang golongan ruang III sebanyak 14 orang, hal tersebut disamping karena jenjang kepangkatan tersebut adalah jenjang kepangkatan maksimal, hal yang lain adalah tidak terakomodirnya jenjang kepangkatan tersebut pada jenjang jabatan di atasnya.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan
Per bulan Desember Tahun 2023

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	1
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	13
Jumlah		16

Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dirinci berdasarkan tingkat eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Tingkat Eselon
Per bulan Desember Tahun 2023

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)
1	II. B	1
2	III. A	1
3	III. B	3
4	IV. A	1
Jumlah		6

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Struktur Organisasi terdapat 6 Jabatan Struktural dan telah terisi semua.

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Per bulan Desember Tahun 2023

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Mobil	2	1	1	-
2	Sepeda Motor	16	-	16	-
3	Almari Kayu	5	-	-	5
4	Meja Kayu	41	33	8	-
5	Kursi Kayu	76	-	76	-
6	Meja Tamu	3	-	3	-
7	Filing Cabinet	7	7	-	-
8	Komputer	7	-	7	-
9	Laptop	8	-	8	-
10	Kamera	2	1	-	1
11	OHP/LCD	1	1	-	-
12	AC	8	8	3	5
13	Brankas	1	1	-	-
14	Lemari Kaca	14	14	4	10
15	Kursi Putar	21	21	-	-
16	Kursi Besi/Lipat	25	15	10	-
17	Meja Komputer	2	-	2	-
18	Printer	15	15	10	5
19	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
	Dan seterusnya sesuai buku inventaris	-	-	-	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan aktivitas berdasarkan sub kegiatan-kegiatan-program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang secara umum dan menjadi kondisi strategis yang dikelola selama kurun waktu Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja (>15 th) Jiwa	813.392	818.165	833.668	837.424	840.947	908.693
2	Angkatan Kerja (>15 th) Orang	553.923	539.370	557.754	554.318	586.536	622.373
3	TPAK (%)	68,10	65,92	66,92	66,19	69,75	68,49
4	Penduduk Yang Bekerja (Orang)	539.800	524.189	539.007	534.879	557.378	599.547
5	Penganggur Terbuka (Orang)	14.123	15.181	18.747	19.439	29.158	22.826
6	TPT (%)	2,55	2,81	3,36	3,51	4,97	3,67
7	Jumlah Perusahaan	895	1432	2092	2215	2241	2190
8	Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP	165	171	171	181	188	189
9	Jumlah Perusahaan yang wajib PP	785	785	785	785	785	785
10	Jumlah Perusahaan yang mempunyai tata kelola kerja yang layak	609	805	1308	1620	1637	1640
11	Jumlah Perusahaan yang dimonitoring pengupahannya	100	100	100	50	50	20
14	Jumlah Perusahaan yang diinventarisir WLKP	46	32	28	7	5	-
16	Jumlah perusahaan yang dibina 5R	50	50	11	15	70	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
17	Jumlah perusahaan yang meningkat produktifitasnya	25	11	9	15	20	
19	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	13	13	14	8	16	21
20	Jumlah kepesertaan BPJS TK	14.972	16.736	20.286	28.617	34.856 (sd okt 2022)	49.753 (sd Des 2023)
21	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	28.422	40.290	42.225	57.123	58.195	58.020
22	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	261	206	321	226	847	875
23	Jumlah Peserta Pelatihan	140	140	140	240	100	160
24	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	0	10	0	0	100	155
25	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	126	646	0	193	122	66 orang (Job Fair BKK SMK Mulu, Klakah dan Tempeh)
26	Jumlah CPMI/PMI yang difasilitasi	292	277	267	105	484	613
27	Jumlah Penyuluhan Perlindungan PMI	1 kali (Desa Randuagung)	2 kali (Desa Pagowan dan Desa Salak)	0	0	100 orang (anggaran Pusatan Propinsi, 2 desa Ranuyoso dan Randuagung)	50 orang (anggaran Pusat, Semua Desa se kec. Senduro)
28	Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan melalui padat karya	500	200	1896	0	5210	0
29	Jumlah LPKS	9	14	16	17	20	25

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
30	Jumlah LPKS yang melaporkan realisasi kegiatan pelatihan	5	4	4	5	17	21
31	Jumlah Transmigran	9 KK	7 KK	nihil	nihil	nihil	nihil
		(18 jiwa)	(21 jiwa)				

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh jajaran eselon III, eselon IV dan jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang meliputi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Transmigrasi
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pada Penjelasan : Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II Pasal 2 bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang P e r u b a h a n

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribunal IV Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribunal IV Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang menjelaskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2018 – 2023
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Tahun 2018–2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

VISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mendukung Misi Ke 2 dari keseluruhan Misi Bupati Lumajang Yakni : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Misi tersebut diimplementasikan melalui tujuan Kedua : Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.

SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai Tujuan yang tertera pada RPJMD tersebut maka ditetapkan sasaran salah satunya adalah :

Meningkatnya Penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator awal sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari 2 indikator tersebut berproses pada penyesuaian Perubahan RPJMD yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengalami penyederhanaan indikator maka untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang awalnya mempunyai 2 indikator seperti yang disebutkan di atas menjadi mempunyai 1 indikator saja yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari Sasaran pada P-RPJMD tersebut kemudian ditetapkan menjadi Tujuan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya akan dilaksanakan secara berkesinambungan sejalan dengan Tujuan yang di tetapkan sebagaimana pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih
		Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif
		Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar

Penetapan Kebijakan

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program.

Tabel 2.2.
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program.

No.	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN PROGRAM
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Meningkatkan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif		
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Meningkatkan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang pelayanan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan koordinasi dan integrasi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta menjalankan konsultasi, mediasi, dan pembinaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

PROGRAM DAN PAGU ANGGARAN

Program terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program beserta pagu anggarannya sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 2.3
Program dan Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023

Program			Anggaran
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1,671,960,345
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	20,400,000
3	Program Hubungan Industrial	Rp.	44,699,000
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	2,867,700
5	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3,812,766,919
JUMLAH		Rp.	5,552,693,964

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Sumber dana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan alokasi anggaran P-APBD TA. 2023 sebesar Rp. 5,552,693,964.00. Dibandingkan dengan pagu APBD TA. 2023 murni yang sebesar Rp. 6.247.618.070,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 694.924.106,00 karena kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk self blocking anggaran. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	96.88%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,671,960,345	DAU & DBHC HT
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	3.9%			
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	84%	Program Penempatan Tenaga Kerja	20,400,000	DAU
				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3,812,766,919	DAU
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	75.01%	Program Hubungan Industrial	44,699,000	DAU
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2,867,700	DAU
	JUMLAH				5,552,693,964	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA TRIBULAN IV TAHUN 2023

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan time schedule dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2023.

Pencapaian tujuan “Meningkatnya penyerapan angkatan kerja” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu realisasi 3,67% dari target 4,50% dengan kategori Sangat Tinggi. Indikator ini menunjukkan semakin rendah nilainya semakin baik, semakin kecil nilainya penyerapan angkatan

kerja semakin banyak sehingga pengangguran yang ada semakin berkurang. Realisasi kinerja tujuan tahun 2023 berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang berdasarkan data ketenagakerjaan per bulan Agustus 2023.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 5 indikator sasaran, secara rata-rata adalah sebesar 79.11% dengan kategori Tinggi..

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023, dengan Tujuan Meningkatnya penyerapan Angkatan Kerja direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tribulan IV Tahun 2023**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG	PENYEBUT	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
A	TUJUAN : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	22826	622373	4.50%	3.67%
	SASARAN :					
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	155	160	96.88%	96.88%
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	21	562	3.9%	3.74%
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	876	1045	84%	83.83%
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1640	2190	75.01%	74.89%
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0	0	0%	0.00%

Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2023, Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023 (data di olah)

1. Capaian Kinerja Perbandingan antara Target dan realisasi tahun pelaporan;

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam kerangka perbandingan antara target dengan realisasi sehingga diperoleh angka capaian kinerja Tribulan IV Tahun 2023, sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Target dibanding Realisasi
Tribulan IV Tahun 2023**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
	TUJUAN :					
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.50%	3.67%	118.44%	Sangat Tinggi
	SASARAN :					
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	96.88%	96.88%	100.00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	3.9%	3.74%	95.90%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	84%	83.83%	99.80%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	75.01%	74.89%	99.84%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	0%	0.00%	Sangat Rendah

Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2023, Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023 (data di olah)

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan indikator terdapat 5 indikator yaitu 1 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran. menunjukkan posisi sangat baik dalam rangkaian upaya pencapaian target p-renja. Ada 1 Indikator yaitu Persentase penempatan transmigran sesuai standar dengan capaian berkategori “Sangat Rendah”.

2. Capaian Kinerja Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu;

**Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja antara Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2023
dibanding dengan Tahun 2022 dan tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5
	TUJUAN :			
A	Tingkat Pengangguran Terbuka	83%	19,27%	118.44%
	SASARAN :			
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	N/A	95.00%	100.00%
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0%	95.90%
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	286,65%	176.85%	99.80%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	108,49%	107.43%	99.84%
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	0%	0.00%

Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2023, Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023 (data di olah)

3. **Capaian Kinerja Perbandingan antara capaian kinerja tahun pelaporan dengan Target akhir tahun perencanaan;**

**Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja antara Realisasi Kinerja Tribulan IV Tahun 2023
dibanding dengan Akhir Tahun Perencanaan (2023)**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TH. 2023	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA (TH. 2023)
1	2	3	4	5
	TUJUAN :			
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.67%	2.50%
	SASARAN :			
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	96.88%	100%
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	3.74%	100%
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	83.83%	48%
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	74.89%	69%
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	100%

Sumber : Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2023, Dinas Tenaga Kerja Tribulan IV Tahun 2023 (data di olah)

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja Tribulan IV Tahun 2023 yang dibandingkan dengan target tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 1 indikator yang capaian kinerja Sangat Rendah. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. TUJUAN : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja, dengan Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor pendukung tercapainya kinerja adalah :

- Adanya pelatihan bagi pencari kerja
- Publikasi informasi ketenagakerjaan
- Dukungan program dan kegiatan dari kementerian ketenagakerjaan maupun provinsi
- Fasilitasi perusahaan dan pencari kerja

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

- Masih adanya pengurangan tenaga kerja di perusahaan
- Manajemen data ketenagakerjaan daerah belum optimal
- Rendahnya serapan tenaga kerja
- Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan

b. SASARAN

Analisis atas kinerja 5 (lima) indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja yang terlatih dengan target 96.88% dan terealisasi 96.88%, capaian kinerja 100.00%. Capaian kinerja tahun 2023 yaitu 96.88% dikarenakan dari target 160 orang yang ikut pelatihan dan lulus uji kompetensi terdapat 5 orang yang tidak lulus uji kompetensi.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan dana cukai DBHCHT.
- Publikasi pelatihan yang optimal melalui medsos.
- Bertambahnya jumlah LPK dan BLK Komunitas.

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

- Anggaran untuk pelatihan masih minim dan bergantung ke dana transfer.
- Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi sehingga apabila ada pelaksanaan uji kompetensi harus ke BLK Provinsi atau wilayah.

Indikator ini didukung dengan satu program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi dari target 160 orang yang lulus uji kompetensi sebanyak 155 orang, sebesar 96.88%. Sampai dengan akhir tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan 8 paket kegiatan pelatihan berbasis kluster kompetensi dengan jumlah peserta 20 orang per paket dengan waktu pelatihan selama 15 hari dengan rincian sebagai berikut :

- 2 pelatihan pengolahan makanan (DAU)
- 6 paket pelatihan sumber dana DBHCHT yaitu pelatihan kecantikan, otomotif, 2 paket pelatihan pengolahan makanan dan 2 paket pelatihan desain grafis.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jember untuk memfasilitasi instruktur pelatihan serta sarana (peralatan) yang dibutuhkan selama pelatihan karena Pemerintah Kabupaten Lumajang belum mempunyai BLK sendiri. Pelaksanaan pelatihan desain grafis bekerja sama dengan BLKK Al Maliki yang merupakan BLK Komunitas binaan Dinas Tenaga Kerja yang memiliki kejuruan multimedia untuk memfasilitasi instruktur pelatihan dan tempat pelatihan.

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina dari target 24 LPKS terealisasi 25 LPKS atau 104,17%. Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 2 aktivitas yaitu sosialisasi kepada LPK di Kabupaten Lumajang dan monitoring dan evaluasi LPK. Pelaksanaan pembinaan LPK sampai dengan tribulan IV tahun 2023 sebanyak 25 LPK. yaitu 12 LPK Swasta dan 13 BLKK di Kabupaten

Lumajang. Ada beberapa pengajuan perijinan baru dari BLK Komunitas yang berada dibawah binaan Dinas Tenaga Kerja yaitu BLKK Pondok Pesantren Anwarul Ahad, BLKK Pondok Pesantren Al Maliki, BLKK Yayasan Darul Falah, LPK Mapan Joyo Sentosa Cabang Lumajang, LPK Global Institut, dan LPK Anugerah. Perijinan LPK/BLKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission). Dari 25 LPK yang ada, 1 LPK sudah berproses menuju akreditasi. Sedangkan yang lainnya masih terkendala oleh sarana yang kurang maksimal maupun anggaran.

2. Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Produktif dari target 3.9% terealisasi 3.74% dengan capaian kinerja 95.90%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- Belum ada data pembandingan pada tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan kecil.

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

- Minimnya perusahaan yang melaksanakan pengukuran produktivitas
- Rendahnya pemahaman perusahaan terkait pengukuran produktivitas
- Kompetensi petugas pengukuran produktivitas belum optimal

Pencapaian indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota.

Jumlah perusahaan yang diukur produktivitas tenaga kerjanya dari target 20 perusahaan yang mengikuti sosialisasi dan desk pengukuran produktivitas, yang hadir sebanyak 13 perusahaan dan yang bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi pengukuran produktivitas sebanyak 12 perusahaan, 1 perusahaan tidak berkenan mengisi data pengukuran produktivitas. Sehingga dari target 20 perusahaan terealisasi 12 perusahaan, atau sebesar 60.00%.

3. Indikator Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan dengan target 84% terealisasi 83.83%, capaian kinerja sebesar 99.80%. Realisasi kinerja didapatkan dari data Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 876 orang dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1045 orang.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- Keterlibatan pihak stakeholder dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
- Adanya kebijakan daerah yang mendukung perluasan kesempatan kerja.
- Tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi disabilitas.

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

- Pelaporan penempatan pencari kerja belum optimal
- Pelaporan penerimaan tenaga kerja belum optimal
- Masih rendahnya kompetensi pencaker disabilitas
- Minimnya sarana penunjang penempatan pencari kerja
- Kurangnya monitoring penempatan kerja

Capaian kinerja ini didukung oleh Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui Program AKL (Antar Kerja Lokal) dengan target 205 orang dan realisasi 236 orang yang berasal dari hasil fasilitasi rekrutmen oleh beberapa perusahaan antara lain :

- BPRS Karya Mega Sentosa sebanyak 4 orang;
- Lab Persada sebanyak 28 orang;
- Alfamart sebanyak 28 orang;
- Indomart sebanyak 17 orang;
- MMI sebanyak 76 orang;
- PSI sebanyak 3 orang (Penyandang Disabilitas);
- FIF sebanyak 1 orang (Penyandang Disabilitas);
- Anugerah Rimba Raya sebanyak 1 orang;
- BTPN Syariah sebanyak 12 orang;
- BKK SMKN Klakah sebanyak 16 orang;
- BKK SMK Muhammadiyah Lumajang sebanyak 30 orang;
- BKK SMKN 1 Tempeh sebanyak 20 orang.

atau tercapai 115.12%, besarnya capaian kinerja ini dikarenakan memaksimalkan koordinasi dan fasilitasi terhadap perusahaan yang melakukan rekrutmen karyawan di Dinas Tenaga Kerja, disamping itu Dinas Tenaga Kerja juga bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 27 Juni 2023 untuk melakukan Sosialisasi tentang Ketenagakerjaan kepada Perusahaan Swasta dan BUMD yang selama ini belum sepenuhnya melaporkan lowongan dan penyerapan tenaga kerja termasuk Penyandang Disabilitas dengan harapan Wajib Laporkan Lowongan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja oleh perusahaan lebih tertib untuk dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja.

Setiap tahun terdapat Program Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI berupa kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan dan Padat Karya yang bersumber dana dari APBN.

Dengan adanya Program Perluasan Kesempatan Kerja, harapan Dinas Tenaga Kerja dapat membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Lumajang dengan prosedur pengajuan proposal untuk diupload melalui aplikasi Bizhub diantaranya :

- Padat Karya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bertujuan untuk dapat mengakomodir masyarakat pencari kerja yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan merupakan tenaga kerja mandiri yang pernah mendapatkan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.

Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terdapat Surat Keputusan Penerima Manfaat Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKM) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai Pendamping dari masing-masing kelompok TKM sebagai berikut :

1. SK PPK Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Dirjen Bina Penta dan PKK Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahap I sejumlah 159 Kelompok;
2. SK PPK Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Dirjen Bina Penta dan PKK Nomor : 3/494/PK.03.03/IX/2023 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahap II sejumlah 28 Kelompok;
3. SK PPK Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Dirjen Bina Penta dan PKK Nomor : 3/393/PK.03.02/VIII/2023 Tentang Penetapan Tenaga Kerja Sukarela Sebagai Pendamping Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun 2023.

Di Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 secara keseluruhan mendapat bantuan sejumlah 192 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang sehingga masyarakat Kabupaten Lumajang yang menerima manfaat sebanyak 1.920 orang dengan jumlah bantuan Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per kelompok sehingga total anggaran yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Lumajang melalui Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula sejumlah Rp. 3.840.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan sistem pengajuan melalui Aplikasi SiapKerja dan Bizhub dan pencairan dana langsung ditransfer ke rekening kelompok.

b. Pengelolaan informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Data Pasar Kerja, target kinerja dan realisasi adalah 0 orang. Hal yang dapat dilaksanakan saat ini adalah bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di SMK untuk bisa melaksanakan Job Fair agar bisa memfasilitasi menyampaikan informasi lowongan kerja dari dunia usaha dan dunia industri serta pendataan pencari kerja khususnya pada alumni sekolah masing-masing, yang sampai saat ini ada 3 SMK yang telah melaksanakan kegiatan Job Fair yaitu SMKN 1 Klakah, SMK Muhammadiyah Lumajang dan SMK Tempeh. Kendala dari kegiatan

Job Fair sampai saat ini adalah banyak pencari kerja yang melamar pekerjaan dan ketika dipanggil perusahaan tidak hadir dan bersifat coba-coba.

c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi, sampai akhir tahun 2023 terealisasi 613 orang yang terdiri dari 563 orang CPMI yang difasilitasi penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspor serta 50 orang Pekerja Migran (PMI) yang dipulangkan dalam kondisi meninggal, sakit, deportasi dan TPPO.

Namun demikian pada kenyataannya apabila diperbandingkan CPMI legal sangat kecil dibanding dengan yang ilegal hal ini disebabkan kurangnya informasi layanan kerja ke luar negeri, terbatasnya akses informasi pasar kerja (dalam dan luar negeri), maraknya praktek percaloan serta masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap resiko untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aman dan masyarakat cenderung menempuh jalur non prosedural.

Kondisi yang terjadi saat ini dimana dengan adanya perubahan aplikasi dalam penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspor yang semula menggunakan SISKOTKLN dan sekarang menggunakan SIAPKerja dan SISKOP2MI dimana sampai dengan saat ini masih belum ada sinkronisasi antara aturan dan system yang digunakan sehingga masih ada kendala dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Disamping itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di daerah kantong PMI Ilegal, karena banyak sekali PMI Ilegal dibandingkan dengan PMI Legal. Hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman masyarakat terhadap sisi positif dan negatif ketika menjadi PMI di Luar Negeri dan masyarakat hanya berpikir pendek bagaimana bisa berangkat dengan janji-janji manis dari para Tekong.
2. Melakukan pembinaan dan monitoring ke Desa Migran Produktif yang merupakan desa kantong PMI Ilegal yang mendapatkan

bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja bagi PMI Purna dengan harapan bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menjadi PMI yang berangkat secara prosedural.

3. Melakukan Diseminasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Bins P2MI Ditjen Bina Pentad a PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Kecamatan Senduro dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme yang benar dan aman dalam Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri mulai dari proses Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.
4. Indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target 75.01% dan terealisasi 74.89%, capaian kinerja sebesar 99.84 %. Realisasi didapatkan dari data Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP/PKB/ LKS Bipartit/ Struktur Skala Upah/ terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1.640 dan data Jumlah Perusahaan di Kabupaten Lumajang sebesar 2.190.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- Kesadaran perusahaan akan pentingnya penyusunan PP dan PKB.
- Mediasi penyelesaian perselisihan HI yang efektif.
- Koordinasi yang baik dengan BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
- Koordinasi yang baik antar Instansi dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi.

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

- Masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tata kelola kerja yang layak.
- Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan terkait tata kelola kerja yang layak.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Hubungan Industrial adalah sebagai berikut :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Target kinerja kegiatan adalah Jumlah pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tahun 2023 sebanyak 15 dokumen dan terfasilitasi sebanyak 20 dokumen terdiri dari Pengesahan Peraturan Perusahaan yang diperbarui sebanyak 19 dokumen, untuk Pengesahan Peraturan Perusahaan baru realisasi 1 dokumen dan untuk Pengesahan Peraturan Kerja Bersama baru realisasi 0 dokumen.

- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah pencegahan perkara perselisihan dan penyelesaian perkara perselisihan yang telah terfasilitasi baik melalui sosialisasi, pembinaan, mediasi maupun bipartite intern perusahaan sebanyak 24 perkara dari target 25 perkara atau sebesar 96,00%.

Capaian tersebut dikarenakan banyaknya kasus perselisihan yang dilaporkan dan telah tertangani. Penyebab banyaknya kasus dikarenakan kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dalam pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit dalam perusahaan.

Adapun realisasi 24 perkara yang telah tertangani terdiri dari :

1. 3 perkara pencegahan perselisihan hubungan industrial yang mana telah dilakukan 3 pencegahan tersebut berupa :
 - Pembuatan posko pengaduan THR Keagamaan
 - Melaksanakan kegiatan May Day (Hari Buruh Internasional) berupa gowes bareng pengusaha, karyawan dan masyarakat
 - Pelaksanaan penetapan upah minimum kabupaten tahun 2024 dan melaksanakan sosialisasi UMK Tahun 2024 dengan mengundang 40 perwakilan perusahaan. Selanjutnya membuat Surat Edaran UMK Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Ibu Pj. Bupati Lumajang.

2. 21 perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah tertangani antara lain :
 - Perselisihan hak terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - Perselisihan hak terkait penahanan ijazah dan BPKB
 - Perselisihan hak terkait klaim insentif yang belum dibayar
 - Perselisihan hak terkait belum dibayarnya gaji/upah dan BPJS Tenaga Kerja
 - Perselisihan hak terkait belum mendapatkan uang pesangon atau kompensasi setelah dilakukan PHK
- c. Dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lumajang terkait manfaat program jamsostek ke perusahaan diharapkan akan menambah kepesertaan jamsostek. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah pekerja yang terfasilitasi jamsostek sebanyak 49.753 orang dari target 60.000 orang atau sebesar 82,92%.
- d. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan ke perusahaan bersama BPJS Kesehatan Cabang Lumajang terkait manfaat program BPJS Kesehatan. Melalui Tim Kepatuhan bersama Kejaksaan, BPJS Kesehatan Cabang Jember dan Lumajang, Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan DPM-PTSP telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan, juga pelaksanaan sosialisasi program JKN kepada 40 perusahaan.
5. Indikator Persentase penempatan transmigran sesuai standar dengan target 0% dan terealisasi 0%, capaian kinerja 0%.

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

- Kebijakan pemerintah pusat yang belum sinergi dengan kebutuhan daerah.
- Ketidak siapan daerah tujuan transmigrasi

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan anggaran yang cukup pada tahun 2023. Efisiensi atas capaian setiap sasaran dan anggaran pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Anggaran Tribulan IV Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	96.88%	96.88%	100.00	1,665,660,345	1,545,855,660	92.81	7.19
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	3.9%	3.74%	95.90%	6,300,000	5,600,000	88.89	7.01
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	84%	83.83%	99.80%	20,400,000	18,700,000	91.67	8.13
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	75.01%	74.89%	99.84	44,699,000	44,197,500	98.88	0.96

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0.0%	0.00%	0.00	2,867,700	0	0.00	0.00

Dari tabel tersebut diatas, dari lima sasaran terdapat satu sasaran yang tidak efisien dan empat sasaran menunjukkan efisien dengan efisiensi tertinggi pada sasaran Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.552.693.964,00 dan realisasi total belanja daerah sebesar Rp. 5.305.998.358,00 (Lima milyar tiga ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas 5 program pada tribulan IV tahun 2023 sebesar 95.56%.

Prinsip dasar penetapan alokasi anggaran adalah kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja terhadap masing-masing sasaran :

**Tabel 3.6
Persentase Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tribulan IV Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	SERAPAN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	1,665,660,345	1,545,855,660	92.81
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	6,300,000	5,600,000	88.89
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	20,400,000	18,700,000	91.67
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	44,699,000	44,197,500	98.88

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	SERAPAN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	2,867,700	0.00	0.00
6	Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	3,812,766,919	3,691,645,198	96.82
Total Pagu Anggaran			5,552,693,964	5,305,998,358	95.56

1. Persentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran

**Tabel 3.7
Persentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran Tribulan IV Tahun 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dilatih	100%	100.0%	100.00%	1,671,960,345	1,551,455,660	92.79	DAU & DBHCHT
		Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	70%	58.33%	83.33%				
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	160 orang	155 orang	96.88%	1,657,746,345	1,537,941,660	92.77	DAU & DBHCHT
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 orang	160 orang	100.00%	1,657,746,345	1,537,941,660	92.77	DAU & DBHCHT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	104.17%	104.17%	7,914,000	7,914,000	100.00	DAU
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	24 Lembaga	25 lembaga	104.17%	7,914,000	7,914,000	100.00	DAU
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	0%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0 perusahaan	0 perusahaan	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diukur produktifitas tenaga kerjanya	20 perusahaan	12 perusahaan	60.00%	6,300,000	5,600,000	88.89	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	50%	6,300,000	5,600,000	88.89	DAU
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%	71,89%	102.70%	20,400,000	18,700,000	91.67	DAU
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	205 orang	236 orang	115.12%	20,400,000	18,700,000	91.67	DAU
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	0 orang	0 orang	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 orang	4 orang	80%	20,400,000	18,700,000	91.67	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dikelola	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> / Bursa Kerja	0 orang	0 orang	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	0 orang	0 orang	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 orang	0 orang	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang mempunyai PP	25.10%	24.08%	95.94%	44,699,000	44,197,500	98.88	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dokumen	20 dokumen	133.33%	44,009,000	43,507,500	98.86	DAU
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Onine	0 perusahaan	0 perusahaan	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0 perusahaan	0 perusahaan	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	6 laporan	100.00%	44,009,000	43,507,500	98.86	DAU
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	25 perkara	24 perkara	96.00%	690,000	690,000	100.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 perkara	3 perkara	100.00%	690,000	690,000	100.00	DAU
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 perkara	0 perkara	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 asosiasi dan 0 SP/SB	0 asosiasi dan 0 SP/SB	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	0 Lembaga	0.00%	0.00	0.00	0.00	DAU
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan	0%	0%	0%	2,867,700	0.00	0.00	DAU
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	0 KK	0 KK	0%	2,867,700	0.00	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 KK	0 KK	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 orang	0 orang	0%	2,867,700	0.00	0.00	DAU
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 lokasi	0 lokasi	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	3,812,766,919	3,691,645,198	96.82	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan</i>	100%	100%	100%	3,339,314,617	3,236,186,690	96.91	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/12 bulan	29 orang/12 bulan	100%	3,301,264,617	3,198,136,690	96.88	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	38,050,000	38,050,000	100.00	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	131,025,302	131,025,087	100.00	DAU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	0%	0.00	0.00	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	48,574,587	48,574,587	100.00	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	21,125,715	21,125,500	100.00	DAU
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0 dokumen	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	61,325,000	61,325,000	100.00	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	100%	100%	282,732,000	266,507,121	94.26	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	87,864,000	71,773,535	81.69	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	194,868,000	194,733,586	99.93	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	59,695,000	57,926,300	97.04	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	100.00%	44,595,000	42,826,300	96.03	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	23 unit	100.00%	15100,000	15,100,000	100.00	DAU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	0 unit	0%	0.00	0.00	0.00	DAU
	TOTAL PAGU ANGGARAN					5,552,693,964	5,305,998,358	95.56	

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang diperoleh melalui penilaian kinerja selama kurun waktu Tribulan IV Tahun 2023, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan Self Blocking atau pengurangan anggaran tahun 2023, sehingga sebagian besar program kegiatan dinas tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan;
- b. Adanya perubahan aplikasi dalam penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspor yang semula menggunakan SISKOTKLN dan sekarang menggunakan SIAPKerja dan SISKOP2MI sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. Masih sering terjadi penyempurnaan/perbaikan sistem administrasi baik keuangan dan sebagainya terkait perubahan peraturan perundang-undangan, hal tersebut cukup menghambat pelaksanaan tugas;
- d. Keterbatasan jumlah personil serta kompetensinya melaksanakan jabatan fungsional, sarana dan prasarana serta anggaran sudah pasti mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak maksimal;
- e. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan (dalam pelaksanaan semua kegiatan terutama terkait pelatihan kompetensi yang bersumber dana DAU);
- f. Pemerintah Daerah belum memiliki BLK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang belum terakreditasi, menyebabkan kesulitan melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi yang terstandart;
- g. Luncuran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait pendirian BLK Komunitas di beberapa Pondok Pesantren yang tidak melalui Dinas Tenaga Kerja kabupaten;
- h. Belum ada turunan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yaitu berupa Peraturan Bupati Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Bupati Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
- i. Masih rendahnya pembinaan dan perlindungan terhadap PMI;
- j. Masih rendahnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh akan pentingnya norma-norma ketenagakerjaan;
- k. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja akan pentingnya manfaat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan;

- l. Pemberangkatan serta penempatan calon transmigran menyesuaikan dengan jadwal dari propinsi dan pusat serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi;
- m. Belum optimalnya sistem pengelolaan data base tenaga kerja daerah;
- n. Perusahaan enggan memberikan data riil baik terkait jumlah tenaga kerjanya, hasil produksi, modal awal dan laba perusahaan, termasuk kewajiban dalam mengisi aplikasi WLKP.

Dari permasalahan yang dihadapi maka diambil langkah- langkah strategi dan kebijakan pemecahan masalah sebagai berikut :

- a. Menyusun skala prioritas program dan kegiatan serta melakukan breakdown penyesuaian pagu anggaran dan kinerja untuk masing-masing sub kegiatan;
- b. Menunjuk petugas/operator SIAPKerja dan SISKOP2MI yang kompeten dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi maupun Kementerian terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam aplikasi SIAPKerja dan SISKOP2MI;
- c. Untuk menyelesaikan semua beban tugas dilakukan dengan cara memaksimalkan personil yang ada, merencanakan pemberangkatan pelatihan kompetensi Jabatan Fungsional;
- d. Melakukan advokasi terkait Pelatihan dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) serta dinas pendidikan yang membawahi SMK/SMA serta Kementerian Agama yang membawahi Pondok Pesantren atau Madrasah;
- e. Mengusulkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Bupati Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ;
- f. Melakukan sinergitas program dimulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, LSM, OPD, Pemerintahan Desa terkait serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ;
- g. Melakukan sosialisasi ke Perusahaan terkait pentingnya pengukuran produktivitas tenaga kerja, pentingnya memberikan data lowongan serta memberikan data riil jumlah karyawan serta mengikuti norma yang berlaku terkait kesejahteraan pekerja serta hubungan Industrial. Dan melakukan sinergitas dengan OPD terkait;
- h. Berkoordinasi dan kerjasama dengan bpjs Ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring secara langsung ke perusahaan, dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Kepatuhan, Kejaksaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa Timur, DPMTSP untuk pembinaan dan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS baik kesehatan maupun Ketenagakerjaan ke perusahaan-perusahaan;

- i. Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan antar lembaga baik horizontal maupun vertikal ;
- j. Melakukan koordinasi secara aktif dengan propinsi maupun pusat terkait penempatan calon transmigran serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi;
- k. Optimalisasi aplikasi SIMNAKER yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan aplikasi Kementerian Tenaga Kerja yaitu SISNAKER guna memperbaiki data ketenagakerjaan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribunal IV Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Indikator Kinerja Tribunal IV Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan hasil baik, namun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribunal IV Tahun 2023 masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribunal IV Tahun 2023 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 5 Januari 2024

PII KERALA DINAS TENAGA KERJA



INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, M.M
NIP. 19681118 199003 1 005

Tabel T-C.25
Matriks Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi kinerja pada awal P-Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir P-Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			Tahun 2020	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka	3,36%	2,81%	3,36%	3,00%	2,75%	2,50%	2,50%
1	Prosentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Tenaga Kerja yang Produktif	81.82%	100%	81.82%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	122.9%	125.7%	122.9%	46%	47%	48%	48%
4	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	62.52%	56.22%	62.52%	67%	68%	69%	69%
5	Prosentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, M.M

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 Desember 2023

Pihak Kedua,


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,


INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, M.M
NIP. 19681118 199003 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	96,88%
2.	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	3,9%
3.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	84%
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	75,01%
5.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigran sesuai Standar	0%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dilatih	100%
		Persentase peningkatan produktifitas perusahaan	70%
2.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mempunyai PP	25,10%
4.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan	0%
5.	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 267,121,185	DAU & DBHCHT
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 3,400,000	DAU

3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	15,429,000	DAU
4. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp	2,867,700	DAU
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp	367,646,215	DAU
JUMLAH	Rp.	656,464,100	

Lumajang, 1 Desember 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pl. KEPALA DINAS TENAGA KERJA



INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, M.M
NIP/19681118 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546 e-mail : disnaker@lumajangkab.go.id.
LUMAJANG – 67311

TABEL DUKUNG DATA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TA 2023

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan		Perubahan	
	orang	orang	orang	Ags 2021–Ags 2022		Ags 2022–Ags 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	orang	persen	orang	persen
Penduduk Usia Kerja	837.424	840.947	908.693	3.523	0,42	67.746	8,06
Angkatan Kerja	554.318	586.536	622.373	32.218	5,81	35.837	6,11
- Bekerja	534.879	557.378	599.547	22.499	4,21	42.169	7,57
- Pengangguran	19.439	29.158	22.826	9.719	50,00	-6.332	-21,72
Bukan Angkatan Kerja	283.106	254.411	286.32	-28.695	-10,14	31.909	12,54
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,51	4,97	3,67	1,46		-1,30	
- Laki-laki	4,42	5,91	3,96	1,49		-1,95	
- Perempuan	2,03	3,58	3,19	1,55		-0,39	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,19	69,75	68,49	3,56		-1,26	
- Laki-laki	84,61	86,16	86,69	1,55		0,53	
- Perempuan	48,97	54,40	50,99	5,43		-3,41	

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 3,67 persen atau turun 1,30 persen dibandingkan Agustus 2022. Lulusan Diploma memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Lumajang sebesar 10,16 persen di susul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 8,63 persen.

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang keadaan ketenagakerjaan Bulan November 2023

Lumajang 12 Januari 2024



Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, M.M

NIP/19681118 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA

Jl. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546 e-mail : disnaker@lumajangkab.go.id.
LUMAJANG – 67311

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023



Bapak Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagai Narasumber memberikan arahan pada Sosialisasi Terpadu Program JKN Tahun 2023



Pelatihan menjahit bagi pencari kerja berbasis kompetensi dan Job Fair di BKK SMKN TEMPEH Tahun 2023



Narasumber dalam Sosialisasi Migrasi Aman bersama SBMI, BPJS Ketenagakerjaan, dan PAC Muslimat NU Klakah dan Pelayanan Rekom ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)



Narasumber dalam Workshop Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus dan Bimbingan Jabatan bagi calon pencari kerja baru siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Lumajang Tahun 2023



Narasumber dalam Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi Perusahaan di Kab. Lumajang bersama BPJS Tahun 2023 dan Mediasi perselisihan Hubungan Industrial

Sumber : Arsip dokumentasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Lumajang 12 Januari 2024


Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, M.M
NIP/19681118 199003 1 005